



THE EFFECT OF FORMAL SECTOR WORKERS AND WOMEN HEAD OF HOUSEHOLDS ON WELFARE IN EAST JAVA

Vitriyani Tri Purwaningsih*¹

Rahma Nida²

^{1,2} Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

The issue of gender inequality is not only seen from different physical forms, but leads to differences in roles, activities, and other things that occur in everyday life. With lower levels of education than men, the majority of women earn low wages by working in the informal sector. The purpose of this study is to analyze the welfare and gaps seen from the employment status and gender of the head of the household using secondary data from IFLS 5 in 2014. The analysis used is 2SLS with Instrumental Variables. The results of this study found that the welfare of household heads who work in the formal sector is higher than those who work in the informal sector. In addition, KRTP tends to have a higher probability of experiencing losses compared to KRTL. KRTP who do not have a partner due to separation or divorce are more likely to be poor than other groups. Another finding is that women who work in the informal sector have a positive and significant relationship with per capita expenditure. The conclusion for the policy of the problems in this research is that the East Java government needs to pay attention to the main pillar of human development, namely by reducing the educational gap, especially for girls.

Keywords : inequality, welfare, formal, informal, gender

JEL : D63, I31, J12, J16, O17

*Korespondensi:

Vitriyani Tri Purwaningsih

E-mail:

vitriyanitp@gmail.com

ABSTRAK

Isu ketidaksetaraan gender tidak hanya dilihat dari bentuk fisik yang berbeda, akan tetapi mengarah pada perbedaan peran, kegiatan, serta hal lainnya yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki, mayoritas perempuan memperoleh upah rendah dengan berkerja di sektor informal. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis kesejahteraan dan kesenjangan yang dilihat dari status pekerjaan dan gender kepala rumah tangga dengan menggunakan data sekunder IFLS 5 tahun 2014. Analisis yang digunakan 2SLS dengan Instrumental Variable. Hasil pada penelitian ini menemukan bahwa kesejahteraan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal lebih tinggi dibandingkan yang bekerja di sektor informal. Selain itu, KRTP cenderung memiliki probabilitas untuk mengalami kerugian dibandingkan KRTL. KRTP yang tidak memiliki pasangan karena pisah atau cerai lebih besar probabilitasnya untuk menjadi miskin dibanding kelompok lainnya. Temuan lain-



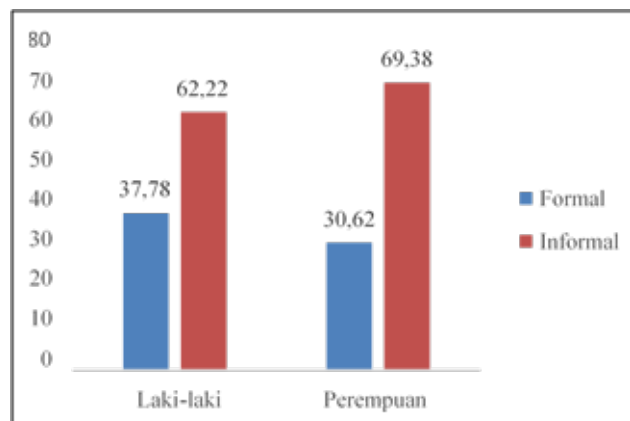
nya yaitu wanita yang bekerja di sektor informal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Kesimpulan untuk kebijakan dari permasalahan dalam penelitian ini adalah pemerintah Jawa Timur perlu memperhatikan pilar utama pembangunan manusia yaitu dengan mengurangi gap pendidikan, khususnya bagi anak perempuan.

Kata Kunci : kesenjangan, kesejahteraan, formal, informal, gender

JEL : D63, I31, J12, J16, O17

Pendahuluan

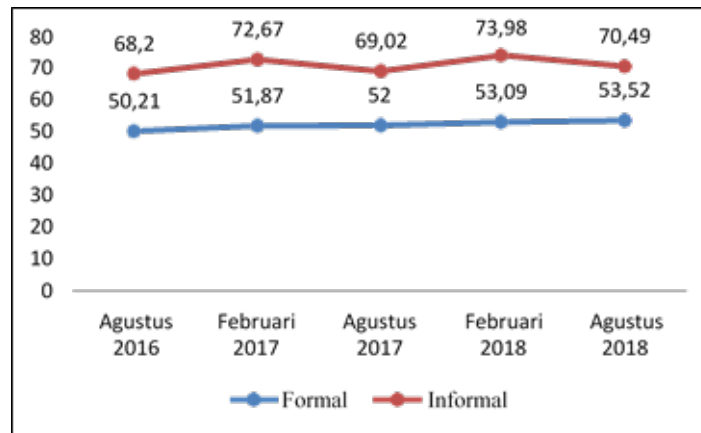
Sebagian besar negara-negara di seluruh dunia sedang memberikan perhatiannya pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu mencapai kesetaraan gender (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Pentingnya kesetaraan gender ini tidak hanya bagi kehidupan sosial bermasyarakat akan tetapi penting juga bagi perekonomian. Menteri Keuangan menyampaikan kesetaraan gender yang akan dicapai ialah partisipasi ekonomi, akses pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan politik antara laki-laki dan perempuan yang sama besar (Kementerian Keuangan, 2019). Dalam hal partisipasi ekonomi, Gambar 1 menjelaskan kondisi perempuan yang bekerja paling banyak berada di sektor informal. Penelitian dari Narayan (2011) dan SOFA Team & Doss (2011) juga menyatakan bahwa wanita lebih banyak berpartisipasi dalam sektor informal.



Gambar 1: Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin 2014

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2015a (diolah)

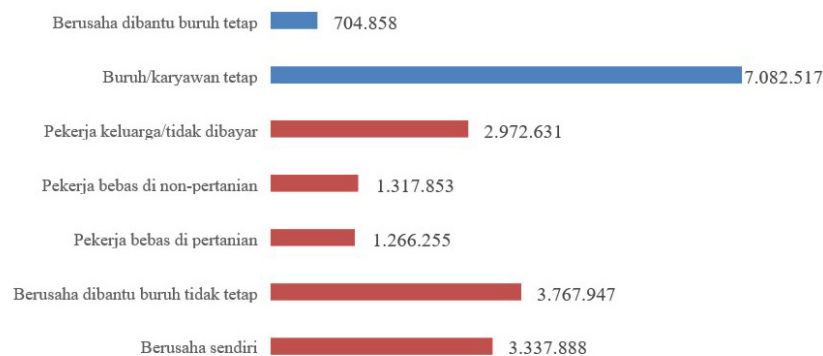
Meskipun pekerja laki-laki juga lebih banyak berada di sektor informal, namun secara persentase perempuan yang bekerja di sektor formal lebih sedikit dibandingkan laki-laki yang bekerja di sektor formal. Gambar 2 menunjukkan tren bahwa di Indonesia setiap tahun jumlah pekerja yang bekerja di sektor formal selalu meningkat, sedangkan sektor informal mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, sektor informal selalu lebih tinggi dibandingkan sektor formal. Hal tersebut dikarenakan sektor informal dapat menjadi satu-satunya alternatif yang terbuka luas bagi orang-orang yang tidak bisa bekerja di sektor formal.



Gambar 2: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan Utama 2016-2018 (juta orang).

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018a (diolah)

Apabila dilihat dari provinsi di di Jawa Timur, lebih dari 7 juta penduduk di Jawa Timur memilih untuk bekerja di sektor formal dengan menjadi karyawan tetap baik di pemerintahan maupun swasta seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Namun pada dasarnya apabila dilihat dari total keseluruhan per sektor, maka sektor informal tetap lebih unggul dibandingkan sektor formal. Penduduk yang bekerja pada informal mayoritas menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap. Hal tersebut didasari karena semakin ketat dan sulitnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Bahkan tidak jarang kesempatan kerja yang ada memberikan persyaratan-persyaratan tertentu pada pelamar seperti bagi pelamar perempuan yang belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa kontrak.



Gambar 3: Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama 2018.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 (diolah)

Batasan-batasan yang muncul pada pekerjaan dikarenakan adanya kekhawatiran pada perempuan yang akan memiliki masa-masa kehamilan, kelahiran dan menyusui ([Kementerian Keuangan, 2019](#)). Sedangkan salah satu tujuan yang akan dicapai melalui SDGs adalah pemberdayaan perempuan dalam semua bidang ([Kementerian PPN/Bappenas, 2019](#)). Kondisi ketidaksetaraan dalam pekerjaan seperti ini juga terjadi di negara-negara lain.

Di Sub-Saharan Africa (SSA), perusahaan yang dipimpin oleh perempuan dinilai memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang dipimpin laki-laki

(Nagler & Naudé, 2017). Ketidaksetaraan gender juga terlihat pada mayoritas perempuan terlibat di dalam sektor non-pertanian (Canagarajah et al., 2001; Rijkers & Costa, 2012), sedangkan laki-laki lebih banyak berpartisipasi dalam pertanian (Bolang & Osumanu, 2019). Selain dilihat dari sektor pekerjaan, ketidaksetaraan gender juga dapat dilihat dari sisi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Klasen & Lamanna (2009) melihat kesenjangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Di Uganda, perempuan yang menerima pendidikan lebih sedikit daripada laki-laki dan untuk meningkatkan kesetaraan gender, kebijakan yang diambil juga harus fokus dalam meningkatkan pendidikan perempuan (Appleton, 1996). Perempuan dinilai cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Padahal perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan berpartisipasi dalam angkatan kerja (Chen & Hamori, 2011) yang tentunya hal tersebut akan memengaruhi upah yang akan diterima.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur (2015b) menunjukkan adanya kesenjangan upah yang cukup besar antar wilayah maupun antar jenis kelamin. Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum selisih rata-rata upah buruh/karyawan antara laki-laki dan perempuan hampir 500 ribu rupiah. Kesenjangan upah ini juga terjadi di Amerika, di mana adanya kesenjangan upah antargender, terutama pada orang tua tunggal laki-laki dan perempuan (Kramer et al., 2016).

Tabel 1: Rata-rata Upah/Gaji Buruh/Karyawan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, Agustus

2014.		
Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan
Laki-laki	1.906.354	1.406.175
Perempuan	1.418.753	926.896

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2015b (diolah)

Perempuan yang sudah menikah dan bekerja dapat mengalami hambatan dalam aktivasinya. Dalam pekerjaan, perempuan dinilai akan sulit menduduki peran manajerial atau pejabat senior (World Economic Forum, 2018) sehingga dari sini perempuan akan mendapatkan gaji yang lebih rendah dari laki-laki. Kesenjangan upah ini tidak sekedar dilihat berdasarkan perbedaan secara finansial akan tetapi dapat menunjukkan bahwa keputusan ekonomi juga masih berada di tangan laki-laki di dalam rumah tangga. Perempuan bahkan mampu menghabiskan waktu rata-rata dua kali lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar (World Economic Forum, 2018)

Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa pembangunan manusia yang dicapai laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia tahun 2018 mencapai 90,96 yang artinya capaian pembangunan manusia laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan (Badan Pusat Statistik, 2019). Kesenjangan terjadi tidak hanya pada pendidikan dan upah, namun rata-rata pendapatan pengeluaran per kapita perempuan di Indonesia berada di kisaran 9 juta rupiah sedangkan laki-laki lebih tinggi mencapai 15,5 juta rupiah (Badan Pusat Statistik, 2019).

Pengeluaran yang rendah mengakibatkan kebutuhan konsumsi baik makanan maupun non makanan dapat tidak terpenuhi dengan baik. Akibatnya kondisi rumah tangga akan mengarah pada kemiskinan. Di Indonesia, persentase perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah tangga miskin perkotaan lebih besar dibanding perdesaan. Rumah tangga dengan pemimpinnya adalah seorang wanita lebih miskin dibandingkan pemimpinnya laki-laki (Klasen et al., 2015; Drèze & Srinivasan, 1997). Rumah tangga yang dipimpin oleh wanita khususnya se-

bagai orang tua tunggal akan rentan terhadap kondisi yang ada di sekitarnya, di mana mereka harus bekerja sendiri, mengurus rumah sekaligus keluarganya.

Di Indonesia, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar salah satunya ialah Jawa Timur. Hampir 11 persen penduduk di Jawa Timur berada dalam kemiskinan ([Badan Pusat Statistik, 2018b](#)). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 11 persen penduduk di Jawa Timur tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya. Sedangkan [Appleton \(1996\)](#) menilai pengeluaran konsumsi dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari partisipasi kepala rumah tangga di sektor formal dan perempuan di sektor informal terhadap kesejahteraan yang diukur melalui pengeluaran per kapita rumah tangga.

Beberapa hal yang diamati dan mungkin berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya ialah penelitian ini melihat bagaimana pengaruh dari pekerja sektor formal terhadap kesejahteraan dan kesenjangan kesejahteraan yang dapat dilihat dari status pekerjaan dan gender kepala rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana perbandingan antara pekerjaan formal dan informal serta kepala rumah tangga laki-laki maupun perempuan yang berperan penting terhadap variasi pengeluaran konsumsi. Untuk melengkapi penelitian ini, terdapat beberapa acuan penelitian yang akan diuraikan pada bagian 2. Selanjutnya di bagian 3 akan dijelaskan data dan metodologi. Bagian 4 akan menjabarkan hasil dan pembahasan dari permasalahan penelitian ini. Kesimpulan dan daftar pustaka akan berada pada bagian paling akhir dari penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk melihat berbagai aspek terkait kesejahteraan. Kesejahteraan cenderung diukur melalui tingkat konsumsi ([Appleton, 1996](#)) karena konsumsi merupakan suatu aktivitas ekonomi yang berperan penting dalam menentukan pendapatan nasional ekonomi ([Khan, 2014](#)).

Kepemimpinan wanita dalam rumah tangga biasanya terjadi karena perpindahan wanita dari tempat asal dan tinggal sendiri (belum menikah) atau pernikahannya mengalami perpisahan sehingga menjadi janda dan ibu tunggal ([Buvinić & Gupta, 1997](#)). Rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan berkaitan erat dengan kemiskinan ([Buvinić & Gupta, 1997](#)). Di Afrika Selatan, dari data tahun 2008-2014 menunjukkan bahwa rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan lebih rentan menjadi miskin dibandingkan rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki ([Biyase & Zwane, 2018](#)).

Namun [Altamirano Montoya & Teixeira \(2017\)](#) justru menemukan sebaliknya, di mana kepala rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki lebih rentan masuk ke dalam kemiskinan multidimensi dibandingkan perempuan. Kondisi ini mungkin saja terjadi karena rumah tangga yang dipimpin oleh wanita tersebut memiliki keterampilan yang lebih baik sehingga menghasilkan pendapatan sendiri dan dapat bertahan hidup bahkan terhindar dari kemiskinan ([Drèze & Srinivasan, 1997](#)).

Konsumsi rumah tangga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rumah tangga, usia kepala rumah tangga ([Khan, 2014](#)) dan pendidikan kepala rumah tangga ([Davies, 2011](#)). Usia kepala rumah tangga secara positif berpengaruh pada pendapatan ([Chen & Hamori, 2011](#)). Pendapatan berarti total pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa konsumen ([Böhm, 1982](#)). Pendapatan untuk pekerja perempuan 30% lebih rendah daripada laki-laki ([Sohn, 2015](#)). Padahal secara tidak langsung perempuan berperan penting dalam konsumsi rumah tangga ([World Economic Forum, 2018](#)).

Pengeluaran per kapita rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan cenderung lebih rendah dibanding rumah tangga yang dipimpin laki-laki (Drèze & Srinivasan, 1997). Meningkatnya pengeluaran per kapita sejalan dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang semakin baik (Majeed & Malik, 2015) terutama pendidikan istri atau pasangan kepala rumah tangga (Rahim et al., 2018). Studi dari Davies (2011) menyatakan bahwa wanita yang lebih berpendidikan akan mengalokasikan sebagian besar untuk digunakan pada pendidikan, pakaian dan perumahan dari pendapatannya. Sedangkan rumah tangga kerah biru cenderung melakukan pengeluaran untuk barang-barang mewah, dan rumah tangga kerah putih justru lebih mementingkan pengeluaran untuk rekreasi, bahan bakar atau listrik (Böhm, 1982).

Meningkatnya konsumsi makanan di dalam rumah tangga dipengaruhi oleh partisipasi dalam pekerjaan non pertanian (Zereyesus et al., 2017). Sedangkan sebagian besar masyarakat perdesaan bekerja di sektor pertanian dan rentan terhadap guncangan ekonomi dan kemiskinan. Salah satu upaya untuk dapat membantu masyarakat berpartisipasi pada pekerjaan non pertanian adalah dengan kemudahan dalam akses informasi. Kepemilikan ponsel dapat mencerminkan pemanfaatan informasi guna meningkatkan partisipasi pada pekerjaan non pertanian (Zereyesus et al., 2017). Metode yang digunakan oleh Zereyesus et al. (2017) ialah Instrumental Variable (IV) untuk mengatasi masalah endogenitas pada partisipasi kerja non-pertanian.

Di Meksiko, ekonomi non-pertanian mampu berkontribusi rata-rata 55 persen terhadap pendapatan rumah tangga perdesaan (Janvry & Sadoulet, 2001). Tingkat produktivitas perusahaan di perdesaan yang dikepalai oleh wanita dengan lokasi jauh dari pusat kota lebih rendah daripada perusahaan di perkotaan dan dipimpin oleh laki-laki (Nagler & Naudé, 2017). Selain itu, perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam sektor informal daripada sektor formal (Narayan, 2011; SOFA Team & Doss, 2011) dan cenderung terlibat dalam ekonomi non pertanian (Ackah, 2011; Canagarajah et al., 2001; Rijkers & Costa, 2012).

Pekerjaan non-pertanian secara umum memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga pertanian, dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan di perdesaan (Arif et al., 2000; Foster & Rosenzweig, 2004; Lanjouw & Murgai, 2009) bahkan probabilitas untuk menjadi miskin semakin kecil ketika pendidikan kepala rumah tangga lebih tinggi (Bi-yase & Zwane, 2018; Majeed & Malik, 2015). Hasil ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan ialah melalui investasi pendidikan dan meningkatkan kondisi ekonomi penduduk perdesaan.

Secara umum, pendidikan dapat memengaruhi partisipasi seseorang dalam sektor pekerjaan (Wamuthenya, 2010). Pendidikan kepala rumah tangga juga dapat memengaruhi kemiskinan di Pakistan (Majeed & Malik, 2015). Penduduk miskin yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah memperoleh penghasilannya dari bekerja di sektor informal (Wamuthenya, 2010) dengan upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja di sektor formal (Bargain & Kwenda, 2011).

Perusahaan besar cenderung mempekerjakan pekerja yang lebih berpendidikan dan terampil (Mitra, 2003). Perempuan dinilai memiliki pendidikan yang lebih rendah dan keterampilan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Hal tersebut akan berpengaruh pada pendapatannya dari bekerja, di mana upah per jam yang diperoleh pekerja pria lebih tinggi daripada wanita (Pradhan & van Soest, 1995) baik pekerjaan formal maupun informal (Chen & Hamori, 2011).

Namun di Afrika, sektor pertanian menjadi sektor lapangan kerja terbesar dan pengembangannya sangat penting untuk memastikan keamanan pangan (Bolang & Osumanu, 2019).

Sedangkan pendapatan dari sektor pertanian adalah sumber pendapatan utama bagi masyarakat pedesaan di Kedah (Mat et al., 2012). Dari sini maka akses kredit menjadi faktor penentu utama dalam partisipasi di sektor pertanian (Ohene, 2013). Akan tetapi, terdapat keterbatasan akses kredit ke lembaga formal karena perlu adanya jaminan yang besar, sedangkan lembaga keuangan tidak dapat memberikan pinjaman kepada petani kecil tanpa jaminan (Quartey et al., 2012). Padahal diperkirakan terdapat 43 persen pekerja pertanian dan tenaga kerja di negara berkembang adalah wanita (Gautam et al., 2013).

Diskriminasi yang terjadi di pasar tenaga kerja mengakibatkan kesenjangan pendapatan pada sektor formal dan informal semakin besar (Xue et al., 2014). Pekerja informal biasanya memiliki jam kerja yang lebih lama namun mendapat upah yang lebih rendah bahkan tidak memiliki asuransi kesehatan maupun dana pensiun. Beberapa pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal juga akan beralih ke sektor informal dengan pendapatan yang lebih rendah dan kondisi kerja yang berbeda dari sebelumnya (Suryahadi et al., 2003). Selain itu, kesenjangan upah juga terjadi antara laki-laki dan perempuan di Amerika Serikat, terutama pada ibu tunggal dan ayah tunggal, di mana ibu tunggal memiliki penghasilan 21% lebih rendah dari ayah tunggal pada tahun 2000 dan 2010 (Kramer et al., 2016).

Ketidaksetaraan gender khususnya pada pekerjaan dan pendidikan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Klasen & Lamanna, 2009). Kerugian yang dialami tidak hanya pada perempuan tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, terutama di Middle East and North Africa (MENA) dan Asia Selatan. Dengan demikian, mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan tidak hanya akan mendorong pertumbuhan tetapi juga akan meningkatkan tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Meskipun mayoritas pembahasan terkait isu gender selalu mengarah pada efek negatif dari partisipasi perempuan, namun Klasen et al. (2015) menemukan rumah tangga di Thailand yang dipimpin oleh wanita lebih kaya dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin pria. Di Uganda, rumah tangga yang dipimpin oleh wanita tidak lebih miskin ketika dinilai berdasarkan konsumsi atau pendapatan (Appleton, 1996). Hal ini disebabkan rumah tangga yang dipimpin oleh wanita mampu melaporkan konsumsi lebih lengkap dan mungkin memperkirakannya dengan tepat daripada rumah tangga yang dikepalai pria.

Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga layak mendapatkan perhatian khusus karena mereka rentan mengalami kemiskinan, diskriminasi gender, dan tidak adanya dukungan sebagai kepala rumah tangga (Buvinić & Gupta, 1997). Adanya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dapat menjadikan salah satunya memiliki probabilitas yang lebih besar untuk menjadi miskin. Bahkan, di dalam studi Buvinić & Gupta (1997) menyebutkan bahwa di Brasil, rumah tangga yang dikepalai wanita memiliki peluang 30 hingga 50% lebih besar untuk hidup dalam kemiskinan karena memiliki penghasilan yang lebih rendah.

Perbedaan upah yang terjadi sebagian besar dikarenakan adanya perbedaan modal manusia (Becker, 1957). Perempuan yang memiliki pekerjaan profesional mendapatkan upah yang lebih rendah bahkan laki-laki memperoleh upah 23% lebih tinggi daripada perempuan (Mitra, 2003). Dalam studi Mitra (2003) dan Mbratana & Kenne (2018) juga menyebutkan bahwa perempuan mendapatkan hanya sedikit kesempatan untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi. Perempuan cenderung menjalankan skala usaha yang lebih kecil dengan memanfaatkan lebih sedikit modal dibandingkan laki-laki (Aronson, 1991). Bahkan sebagian besar negara menilai ketidaksetaraan juga dapat dilihat dari peran perempuan yang tidak memiliki kendali langsung atas sumber daya dan aset ekonomi. (World Economic Forum, 2018). Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai melalui SDGs adalah kesetaraan berupa pemberdayaan atau keterlibatan dan peran perempuan pada semua bidang (Kementerian PPN/Bappenas,

2019).

Metodologi Penelitian

Model teoretis pengeluaran rumah tangga dalam penelitian ini dikembangkan dari teori yang digunakan oleh [Davies \(2011\)](#) dan [Drèze & Srinivasan \(1997\)](#) dalam penelitian mereka. Analisis pengeluaran rumah tangga di negara berkembang dan maju memperhitungkan rumah tangga sebagai unit pembuat keputusan. Rumah tangga diukur sebagai “satu unit” yang menentukan keputusan. Teori ini adalah teori tradisional model neoklasik yang tidak memperhitungkan heterogenitas individu (anggota rumah tangga) dalam rumah tangga.

Penelitian Bergstrom (1989) dalam penelitian [Davies \(2011\)](#) menggunakan Teori Becker dalam pembangunan model. Kepala rumah tangga yang dinotasikan sebagai individu j digunakan sebagai perwakilan rumah tangga untuk memaksimalkan utilitas dengan budget constraint rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dapat dibagi menjadi barang publik (G) dan swasta (C_j), sehingga persamaannya:

$$\text{Max } c W = U_1(C_1, \dots, C, G;)$$
 (1)

Dalam model tersebut, semua anggota rumah tangga mempunyai preferensi yang sama. Asumsi ini dikembangkan oleh Teori Becker dan Samuelson. Becker mengatakan bahwa semua keputusan pengeluaran dibuat oleh kepala rumah tangga. Samuelson mempunyai teori “stable consensus” yang menyatakan setiap individu mempunyai utilitas yang sama.

Pengukuran konsumsi rumah tangga dihitung di tingkat rumah tangga, bukan tingkat individu. Distribusi antar anggota rumah tangga sangat mungkin untuk tidak rata, bisa saja seseorang yang tinggal dalam rumah tangga yang mempunyai tingkat konsumsi tinggi, tetapi salah satu individu mempunyai level konsumsi yang rendah, begitu pula sebaliknya. Namun, [Drèze & Srinivasan \(1997\)](#) dalam penelitiannya mengatakan kita tetap bisa mengukur konsumsi per kapita dengan menginterpretasikan apakah seorang individu terkonsentrasi dalam rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita yang rendah atau tinggi.

Asumsi penggunaan rata-rata pengeluaran per kapita sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga tidak menjadi masalah jika peneliti memasukkan faktor demografi. Deaton dan Muellbauer (1980) dalam penelitian [Lanjouw & Ravallion \(1995\)](#) menyatakan data dari sisi permintaan dan penawaran rumah tangga yang disertai estimasi variabel demografi akan memengaruhi biaya dari level utilitas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan karakteristik kepala rumah tangga yang mencakup sosial, ekonomi, dan demografis.

Beberapa penelitian telah menggunakan informasi kepala rumah tangga sebagai pengukuran kemiskinan atau pendapatan rumah tangga ([Biyase & Zwane, 2018](#); [Chen & Hamori, 2011](#); [Khan, 2014](#)). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perhitungan disparitas pekerja formal dan informal serta kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki. Selain itu, penulis juga memperhitungkan status pernikahan kepala rumah tangga terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Pada studi terdahulu menemukan upah yang diperoleh pekerja di sektor formal lebih tinggi daripada sektor informal ([Bargain & Kwenda, 2011](#); [Tansel & Kan, 2012](#); [Khan, 2014](#)). Pendidikan yang rendah dan tanggung jawab yang dimiliki oleh perempuan untuk merawat dan mengasuh anaknya dapat menjadikan probabilitas perempuan untuk masuk dan berpartisipasi di sektor informal semakin besar ([Gallaway & Bernasek, 2002](#); [International Labor Organization, 2014](#)).

Dalam disparitas gender, KRTP memiliki kerugian yang lebih besar dalam kesejahteraan

dibandingkan dengan KRTL (Buvinić & Gupta, 1997). Namun, kerugian ini menjadi lebih kuat pengaruhnya jika status kepala rumah tangga tersebut adalah janda (Appleton, 1996; Drèze & Srinivasan, 1997). Untuk mengontrol keadaan distribusi konsumsi rumah tangga, penulis menambahkan variabel jumlah anggota rumah tangga, jumlah anak, dan satu anggota rumah tangga yang mengindikasikan anggota rumah tangga tunggal. Hal ini diperhitungkan karena ukuran keluarga memengaruhi konsumsi per kapita atau status ekonomi rumah tangga (Bi-yase & Zwane, 2018; Khan, 2014; Lanjouw & Ravallion, 1995). Variabel usia, pendidikan, desa, dan kabupaten digunakan sebagai variabel yang mewakili keadaan demografi rumah tangga yang diwakilkan oleh kepala rumah tangga. Selain itu, penulis juga menambahkan kepemilikan lahan pertanian sebagai proksi kepemilikan aset. Untuk menyederhanakannya, penulis menyajikan Model 1 sebagai model estimasi untuk menjawab penelitian ini.

$$\begin{aligned}
 LPengeluaranKapita_i = & \alpha + \beta_1 PFormal + \beta_2 KRTP_i + \beta_3 KRTPJanda_i + \\
 & \beta_4 KRTPInformal_i + \beta_5 Usia_i + \beta_6 Usia^2 + \beta_7 SMA_i + \beta_8 \cdot JumlahART_j + \\
 & \beta_9 SatuART_j + \beta_{10} JumlahAnak_j + \beta_{11} LahanPertanian_j + \beta_{12} Desa_k + \\
 & \beta_{13} Kabupaten_k + \varepsilon
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

Berdasarkan pengukurannya, variabel pengeluaran adalah variabel pengeluaran per kapita rumah tangga selama satu bulan dalam bentuk log. Untuk variabel formal, digunakan perhitungan dummy, yaitu bernilai 1 apabila bekerja di sektor formal dan 0 untuk sektor informal. Variabel dummy juga berlaku untuk variabel KRTP, KRTPJanda, dan KRTPInformal, bernilai 1 sesuai dengan nama yang ditampilkan dan bernilai 0 untuk selain dari itu. Dalam perhitungan pendidikan, penulis membedakan KRT yang minimal mempunyai ijazah setara SMA dan yang tidak mempunyai ijazah setara SMA. Untuk variabel LahanPertanian, penulis menggunakan variabel dummy yang bernilai 1 jika rumah tangga mempunyai lahan untuk pertanian dan 0 jika tidak mempunyai lahan pertanian.

Dalam persamaan di atas, penulis menduga ada isu endogenitas dari variabel formal. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa terdapat faktor di luar model yang memengaruhi pilihan seseorang dalam bekerja di sektor formal ataupun informal. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara variabel formal dan error term (ε). Isu ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel instrumen (IV). Wooldridge (2016) mengatakan pemilihan IV yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu (1) IV tidak boleh berhubungan secara langsung terhadap variabel dependen, (2) IV harus berhubungan signifikan terhadap variabel X (variabel yang terindikasi adanya endogenitas), dan (3) IV tidak boleh berhubungan terhadap ε .

Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan kendaraan dan ponsel sebagai variabel instrumen. Variabel-variabel tersebut merupakan variabel instrumen yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dalam menentukan pilihan seseorang bekerja di sektor non pertanian atau sektor pertanian (Babatunde & Qaim, 2010; Biyase & Zwane, 2018; Ruben & Van Den Berg, 2001). Telepon genggam dapat digunakan untuk menyebarkan dan mendapatkan informasi pekerjaan dengan mudah dan murah (Beuermann et al., 2010). Untuk menghitung IV yang baik, maka dilakukan estimasi first stage seperti dalam Model 2. Hasil estimasi variabel formal dimasukkan ke dalam persamaan awal sehingga mendapatkan persamaan Model 3. Disebabkan ada beberapa variabel lainnya, maka penelitian ini menggunakan analisis Two Stage Least Square (2SLS). Tabel 2 menunjukkan detail penjelasan dari setiap variabel yang digunakan dalam model penelitian.

$$PFormal_i = \gamma + \delta Kendaraanponsel_j + \mu
 \tag{3}$$

$$\begin{aligned}
LPengeluaranKapita_i = & \alpha + \beta_1 P\widehat{Formal} + \beta_2 KRTP_i + \beta_3 KRTPJanda_i + \\
& \beta_4 KRTPInformal_i + \beta_5 Usia_i + \beta_6 Usia^2_i + \beta_7 SMA_i + \beta_8 JumlahART_j + \\
& \beta_9 SatuART_j + \beta_{10} JumlahAnak_j + \beta_{11} LahanPertanian_j + \beta_{12} Desa_k + \\
& \beta_{13} Kabupaten_k + \varepsilon
\end{aligned}
\tag{4}$$

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indonesian Family Life Survey 5 (IFLS 5) tahun 2014. IFLS adalah data longitudinal rumah tangga yang dimulai dari tahun 1993. Dengan menggunakan kode provinsi BPS tahun 2014, penulis membatasi penelitian ini untuk rumah tangga yang berada di daerah provinsi Jawa Timur. Setelah dilakukan pembersihan dan penggabungan data, total rumah tangga dalam observasi ini adalah 1.384 rumah tangga.

Isu dari penelitian ini adalah adanya kemungkinan measurement error. Hal ini terjadi karena IFLS merupakan survei yang dilakukan pengacakan di tingkat nasional, bukan di tingkat daerah (Strauss et al., 2014). Namun, Kirchberger (2017) mengemukakan bahwa pengambilan satu atau beberapa kota saja dalam IFLS dapat dilakukan karena hal ini dapat mengurangi terjadinya heterogenitas yang ada di Indonesia.

Tabel 2: Deskripsi Variabel

Nama Variabel	Deskripsi Variabel
LPengeluaranKapita	Pengeluaran per kapita setiap rumah tangga dalam bentuk natural logaritma.
Pformal	Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal bernilai 1 dan yang tidak bekerja di sektor formal bernilai 0.
KRTP	Kepala rumah tangga yang mempunyai jenis kelamin perempuan bernilai 1 dan lainnya bernilai 0.
KRTPJanda	Kepala rumah tangga yang berstatus janda bernilai 1 dan lainnya bernilai 0.
KRTPInformal	Kepala rumah tangga perempuan yang bekerja di sektor informal bernilai 1 dan lainnya bernilai 0.
Usia	Usia kepala rumah tangga.
Usia ²	Usia kepala rumah tangga dalam bentuk kuadrat.
SMA	Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh kepala rumah tangga. Jika kepala rumah tangga minimal telah menamatkan SMA, nilainya adalah 1. Nilai 0 untuk kepala rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMA atau setingkat SMA.
JumlahART	Jumlah anggota rumah tangga.
SatuART	Rumah tangga yang hanya memiliki 1 anggota rumah tangga bernilai 1 dan lainnya bernilai 0.
JumlahAnak	Jumlah anak di setiap rumah tangga.
LahanPertanian	Rumah tangga yang memiliki lahan pertanian bernilai 1 dan yang tidak memiliki lahan pertanian bernilai 0.
Desa	Rumah tangga yang berlokasi di desa bernilai 1 dan yang berlokasi di kota bernilai 0.
Kabupaten	Rumah tangga yang berlokasi di kabupaten bernilai 1 dan yang berlokasi di kota bernilai 0.
Kendaraan_Ponsel	Rumah tangga yang setidaknya memiliki kendaraan atau ponsel memiliki nilai 1 dan rumah tangga yang tidak memiliki keduanya bernilai 0.

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian berdasarkan analisis deskripsi statistik den-

gan menggunakan analisis tabulasi sederhana dan 2SLS dengan Instrumental Variable yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Pembahasan mencakup perbandingan hasil studi ini dan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu, penulis juga membandingkan hasil penelitian dengan data BPS Provinsi Jawa Timur dan membandingkan struktur data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan tabulasi sederhana.

Karakteristik sampel yang diamati di dalam penelitian ini disajikan seperti pada Tabel 3. Masyarakat Jawa Timur memiliki pengeluaran per kapita rata-rata Rp 1.036.324,00. Data ini menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita yang dihitung oleh BPS. Jawa Timur memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp 674.580,00 pada tahun 2014 dan Rp 830.472,00 pada tahun 2015 (BPS, 2016b). Namun, pada tahun 2015 rata-rata penduduk perkotaan di Jawa Timur memiliki konsumsi per kapita di atas satu juta. Hal ini menunjukkan rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kesejahteraan di atas rata-rata.

Tabel 3: Deskripsi Statistik

Variabel	Observasi	Rata-rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
Pengeluaran per kapita	1.384	1.036.324	838222,7	155621,3	8.429.277
Pekerjaan formal	1.384	0,4263006	0,4947173	0	1
Kepala rumah tangga perempuan (KRTP)	1.384	1,0787572	0,2694568	1	2
KRTP bersatus janda	1.384	0,025289	0,1570583	0	1
KRTP dan bekerja di sektor informal	1.384	0,047688	0,213182	0	1
Usia	1.384	44	12,89	17	91
Pendidikan KRT (Minimal telah lulus setingkat SMA)	1.384	0,348988	0,476823	0	1
Jumlah anggota rumah tangga	1.384	3,63	1,55	1	10
Jumlah anak	1.384	0,812139	0,891494	0	5
Rumah Tangga dengan 1 anggota	1.384	0,075145	0,26372	0	1
Mempunyai kendaraan dan ponsel	1.384	0,7962428	0,4029361	0	1
Lahan pertanian	1.384	0,287572	0,452794	0	1
Desa	1.384	0,421965	0,494052	0	1
Kabupaten	1.384	1,84	0,370425	1	2

Variabel jenis pekerjaan dan gender digambarkan oleh variabel formal, KRTP, dan variabel interaksi antara status pernikahan serta status pekerjaan. Pada variabel formal, ditemukan sekitar 42% dari responden memiliki status pekerjaan formal, tidak ada perbedaan jumlah yang signifikan antara pekerja formal dan informal dalam observasi ini. Dalam kepemimpinan rumah tangga, hanya sekitar 8% yang dipimpin oleh perempuan. Hal ini memang sewajarnya terjadi karena Indonesia memiliki dominasi kepemimpinan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Kepemimpinan wanita dalam rumah tangga biasanya terjadi karena perpindahan wanita dari tempat asal dan tinggal sendiri (belum menikah) atau karena ada permasalahan dalam pernikahan sehingga menjadi janda dan ibu tunggal (Buvinić & Gupta, 1997). Jika dibandingkan dengan kelompok lainnya, KRTP berstatus janda dan KRTP bekerja di

sektor informal berjumlah kisaran 2% dan 4%, secara berurutan.

Tabel 3 juga menampilkan status sosial dan ekonomi dari sampel penelitian ini. Rata-rata usia kepala rumah tangga dalam observasi ini adalah 44 tahun dengan hanya berkisar 34%-35% yang telah minimal mempunyai ijazah setara SMA. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pendidikan di daerah Jawa Timur yang digambarkan oleh responden penelitian ini. Untuk komposisi rumah tangga, rata-rata rumah tangga memiliki 4 anggota rumah tangga dan 1 anak dalam rumah tangga tersebut. Hal ini megindikasikan kemungkinan adanya orang tua yang masih tinggal bersama anaknya yang sudah mempunyai rumah tangga. Hanya sekitar 7% dari observasi yang berstatus anggota rumah tangga tunggal. Untuk status ekonomi rumah tangga, terlihat dari sampel sekitar 29% memiliki lahan pertanian dan 80% telah memiliki kendaraan dan ponsel. Dalam pembagian wilayah, sekitar 42% tinggal di wilayah desa dan 84% berada di kabupaten.

Analisis tabulasi digunakan untuk melihat hubungan kepala rumah tangga berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan status pekerjaan yang dibagi berdasarkan sektor formal dan 6 pekerjaan informal lainnya. Dalam Tabel 4, terlihat pekerjaan formal untuk KRTL (Kepala Rumah Tangga Laki-laki) dan KRTP mempunyai besaran sekitar 42% dan 41% dari masing-masing total sampel berdasarkan gender. Tabel 5 menunjukkan dominasi pekerjaan KRTP adalah perempuan yang telah menikah dan memiliki suami, yaitu sekitar 49%. Untuk KRTP berstatus janda adalah sekitar 32% dan sisanya belum menikah.

Tabel 4: Kategori Pekerjaan Berdasarkan Gender Kepala Rumah Tangga

Kategori pekerjaan	KRTL	KRTP	Total
Pekerja formal	545	45	590
Berusaha sendiri	207	24	231
Berusaha sendiri dengan bantuan anggota rumah tangga atau karyawan tidak tetap	326	13	339
Pekerja keluarga tidak dibayar	32	8	40
Pekerja bebas di pertanian	50	9	59
Pekerja bebas di non pertanian	115	10	125
Total	1.275	109	1.384

Tabel 5: Status Pernikahan KRTP Berdasarkan Kategori Pekerjaan

Kategori pekerjaan	Belum menikah	Menikah	Pisah	Cerai Hidup	Total
Pekerja formal	15	19	2	9	45
Berusaha sendiri	2	15	1	6	24
Berusaha sendiri dengan bantuan anggota rumah tangga atau karyawan tidak tetap	1	6	3	3	13
Pekerja keluarga tidak dibayar	1	3	0	4	8
Pekerja bebas di pertanian	0	5	0	4	9

Kategori pekerjaan	Belum menikah	Menikah	Pisah	Cerai Hidup	Total
Pekerja bebas di non pertanian	2	5	1	2	10
Total	21	53	7	28	109

Pembahasan selanjutnya adalah hasil dari analisis regresi 2SLS dengan menggunakan instrumental variable (IV) kepemilikan kendaraan dan ponsel. Penulis mendapatkan adanya endogenitas pada variabel pekerjaan formal dan variabel kepemilikan kendaraan dan ponsel adalah IV yang kuat setelah dilakukan Uji Endogenitas dan Uji First Stage (hasil uji bisa dilihat di Lampiran). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode IV adalah langkah yang tepat. Penulis menyederhanakan hasil penelitian dalam Tabel 6 dengan menampilkan beberapa simulasi regresi dengan menggunakan atau menghilangkan variabel kontrol.

Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal mempunyai kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal. Kesejahteraan diukur dengan pengukuran pengeluaran per kapita. Hasil dari Model 1 sampai Model 5 di Tabel 6 menampilkan hasil yang konsisten dengan pengaruh positif dan signifikan secara statistik. Perbedaan pendapatan per kapita sebesar 20 kali lipat ((hasil antilog koefisien $- 1) \times 100\%$) antara kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal dan informal. Temuan tersebut dapat terindikasi dari kesenjangan upah antara pekerja di sektor formal dan informal. Pekerja di sektor formal memperoleh upah yang lebih besar (Bargain & Kwenda, 2011; Tansel & Kan, 2012). Namun, data di Jawa Timur menunjukkan partisipasi pekerja di sektor informal lebih besar dibandingkan partisipasi di sektor formal (BPS, 2016a). Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Jawa Timur untuk lebih memperhatikan para pekerja di sektor informal, seperti pengaturan tingkat upah dan perlindungan sosial untuk para buruh yang bekerja di sektor informal.

Tabel 6: Hasil Analisis Regresi Menggunakan IV

Variabel (Pengeluaran per kapita)	Model 1 b/t	Model 2 b/t	Model 3 b/t	Model 4 b/t	Model 5 b/t
Pekerjaan formal	0,851*** (3,71)	1,033*** (3,91)	1,172*** (3,54)	2,989** (2,46)	3,056** (2,32)
Kepala rumah tangga perempuan (KRTP)		0,162*** (2,61)	-0,060 (-0,28)	-0,983** (-2,07)	-1,003** (-1,99)
KRTP bersatus janda			-0,273** (-2,16)	-0,396** (-2,19)	-0,411** (-2,09)
KRTP dan bekerja di sektor informal			0,610* (1,70)	2,130** (2,10)	2,178** (2,01)
Usia				0,039** (2,22)	0,039** (2,18)
Usia ²				-0,000 (-1,31)	-0,000 (-1,24)

Variabel (Pengeluaran per kapita)	Model 1 b/t	Model 2 b/t	Model 3 b/t	Model 4 b/t	Model 5 b/t
Pendidikan KRT (Minimal telah lulus setingkat SMA)				-0,207	-0,199
				(-0,85)	(-0,83)
Jumlah anggota rumah tangga				-0,136***	-0,137***
				(-4,20)	(-4,13)
Rumah Tangga dengan 1 anggota				0,288	0,292
				(1,43)	(1,45)
Jumlah anak				0,038	0,042
				(0,73)	(0,78)
Lahan pertanian				0,633***	0,620***
				(2,84)	(2,86)
Desa					0,050
					(0,50)
Kabupaten					0,045
					(0,35)
Konstanta	13,285***	13,186***	13,127***	11,422***	11,283***
	(136,78)	(114,79)	(91,56)	(12,50)	(10,12)
Tingkat signifikansi: ***1%, **5%, *10%					

Selain terdapat kesenjangan pada sektor pekerjaan, penelitian ini juga menemukan kesenjangan kesejahteraan antara rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki dan perempuan. KRTP cenderung mengalami probabilitas untuk mengalami kerugian dibandingkan KRTL. Dalam penelitian ini, variabel KRTP mengalami perbedaan hasil antara model, tetapi setelah dikontrol dengan variabel lainnya (Model 5), ditemukan bahwa KRTP mengalami probabilitas untuk mempunyai pengeluaran per kapita lebih kecil sebesar 63% dibandingkan KRTL. Studi [Buvinić & Gupta \(1997\)](#) melakukan tinjauan studi tentang kemiskinan yang dihadapi oleh rumah tangga yang dipimpin oleh wanita. Dari 65 studi yang dikaji, mereka menemukan 61 penelitian yang mempunyai hubungan antara KRTP dan kemiskinan.

Dari penelitian tersebut, ada tiga hal yang menjadi faktor terjadinya kemiskinan. Pertama, sistem pemerintahan yang lebih memperhatikan income transfer ayah ke anak dibandingkan ibu. Kedua, adanya kesenjangan upah gender atau kurangnya kesempatan wanita dalam akses sumber daya, seperti lahan, modal, dan teknologi, padahal mereka juga sama seperti KRTL, sama-sama menanggung beban keluarga. Ketiga, adanya kemungkinan wanita tersebut mengalami pernikahan yang lebih cepat (pernikahan usia remaja) sehingga menyebabkan ketidakstabilan keluarga dan ekonomi yang dihadapi. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Afrika Selatan dengan menggunakan data tahun 2008-2014 ([Biyase & Zwane, 2018](#)) juga menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian ini. Mereka menemukan KRTP lebih rentan untuk masuk ke kemiskinan dibandingkan KRTL. Namun, penelitian yang mengukur kemiskinan dengan kemiskinan multidimensi tidak ditemukan hasil yang serupa dengan penelitian ini. [Altamirano Montoya dan Teixeira \(2017\)](#) menemukan bahwa kepala rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki lebih rentan untuk masuk dalam kemiskinan multidimensi dibandingkan kepala rumah tangga perempuan. Di Vietnam dan Thailand, apabila rumah tangga dipimpin oleh perempuan cenderung lebih kaya dibandingkan rumah tangga dipimpin oleh laki-laki ([Klasen et al., 2015](#)). Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa wanita tidak selalu menjadi

kelompok yang paling rentan dalam kemiskinan.

Appleton (1996) menemukan perbedaan kesenjangan juga terlihat status pernikahan. Probabilitas untuk menjadi miskin lebih besar bagi KRTP yang tidak memiliki pasangan karena pisah ataupun cerai dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Drèze & Srinivasan (1997). Secara signifikan ditemukan hubungan yang negatif antara perempuan berstatus janda dengan pengeluaran per kapita. Selain itu, Biyase & Zwane (2018) juga menemukan hasil seperti yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu adanya kerentanan yang lebih besar untuk masuk ke kemiskinan bagi kepala rumah tangga yang cerai karena ditinggal oleh pasangan atau ditinggal karena kematian, tidak menikah, dan hidup bersama pasangan tanpa status pernikahan dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang menikah. Dari Model 5, terlihat ada perbedaan sebesar 33,70% dibandingkan kelompok lainnya. Angka ini menunjukkan perbedaan yang lebih kecil dibandingkan KRTP secara keseluruhan tanpa melihat status pernikahan.

Penelitian ini menemukan hasil menarik yang cukup berbeda dengan hasil penelitian lainnya. Penulis menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara wanita pekerja informal terhadap pengeluaran per kapita dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini bertentangan dengan beberapa data di Jawa Timur dan penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja wanita di sektor informal lebih rendah (Sohn, 2015). Berdasarkan data BPS Jawa Timur dan menurut status pekerjaan utama tahun 2014 (BPS, 2015a), 44,92% perempuan yang bekerja di perkotaan mempunyai status sebagai buruh, karyawan, atau pegawai (formal) dan 43,42% di pedesaan mempunyai status sebagai pekerja keluarga tidak dibayar. Dua status pekerjaan di atas adalah proporsi terbanyak dari pekerja wanita berdasarkan wilayah. Urutan kedua ditempati oleh pekerjaan berusaha sendiri (informal) untuk kedua wilayah, yaitu perkotaan dan pedesaan.

Di sisi lain, International Labor Organization (2014) melakukan penelitian di Jawa Timur tentang pekerjaan rumahan, temuan dari studi tersebut adalah besarnya partisipasi wanita dalam pekerjaan ini, tetapi masih sedikit perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, penulis melihat struktur data dengan analisis tabulasi silang sederhana. Tabel 4 menunjukkan 64% dari pekerja informal wanita yang berstatus sebagai kepala rumah tangga masih berstatus menikah dalam rumah tangga tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya kontribusi pemasukan dari suami yang tidak tinggal dalam satu rumah tangga yang sama sehingga pengeluaran per kapita lebih besar dari kelompok lainnya. Selain itu, jika dibandingkan berdasarkan status pekerjaan, sekitar 58% memiliki usaha sendiri tanpa karyawan atau dengan karyawan tidak tetap. Namun, hal ini belum dipastikan menjadi penyebabnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab isu ini.

Beberapa variabel kontrol lainnya yang menampilkan hasil yang signifikan secara statistik adalah usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan kepemilikan aset yang diprosikan menggunakan kepemilikan lahan pertanian. Temuan tersebut menemukan hal yang sama dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Biyase & Zwane (2018), Chen & Hamori (2011) serta Rahim et al. (2018). Namun, variabel tingkat pendidikan dan wilayah tempat tinggal tidak terdapat perbedaan dalam penelitian ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menemukan adanya kesempatan yang lebih besar dari pekerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan berada di daerah perkotaan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar (Biyase & Zwane, 2018; Chen & Hamori, 2011; Khan, 2014; Ma-jeed & Malik, 2015).

Hal menarik yang dapat dilihat dari hasil penelitian adalah struktur ukuran rumah tangga. Jumlah anak dalam rumah tangga tidak memengaruhi perbedaan pendapatan per

kapita, tetapi jumlah anggota rumah tangga mempunyai perbedaan yang cukup besar, yaitu setiap penambahan 1 orang anggota rumah tangga akan mengurangi 13,7% pengeluaran per kapita. Penulis menduga adanya pengaruh dari tanggungan penduduk lansia dalam rumah tangga. Pada tahun 2014, provinsi Jawa Timur memiliki proporsi penduduk usia tua sebesar 10,69% dari total penduduk Jawa Timur (BPS, 2015b), persentase tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun, hal ini belum bisa dipastikan karena dibutuhkan penelitian selanjutnya untuk membahas isu ini.

Kesimpulan

Salah satu penyebab kemiskinan adalah kesenjangan upah atau perbedaan kesempatan untuk bekerja yang terjadi di masyarakat. Disparitas perekonomian telah banyak ditemukan antara pekerja formal dan informal. Selain itu, kesenjangan tersebut juga muncul dalam ranah gender. Kedua hal ini telah banyak diteliti dan pendidikan adalah salah satu faktor yang berkontribusi dalam kesenjangan tersebut. Berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2014, partisipasi perempuan di sektor informal lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi perempuan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informasi karakteristik kepala rumah tangga untuk melihat perbedaan kesejahteraan dari informasi pengeluaran per kapita. Kepala Rumah Tangga (KRT) yang bekerja di sektor formal mempunyai kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KRT yang bekerja di sektor informal. Selain terdapat kesenjangan pada sektor pekerjaan, penelitian ini juga menemukan kesenjangan antara rumah tangga yang dipimpin oleh laki-laki dan perempuan. KRTP cenderung mengalami probabilitas untuk mengalami kerugian dibandingkan KRTL. Selain itu, perbedaan kesenjangan juga terjadi jika dilihat dari status pernikahan. KRTP yang tidak memiliki pasangan karena pisah atau cerai memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Di sisi lain, penulis menemukan hal yang menarik, yaitu adanya hubungan positif dan signifikan antara wanita pekerja informal terhadap pengeluaran per kapita dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini bertentangan dengan beberapa data di Jawa Timur dan penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja wanita di sektor informal lebih rendah. Jika dilihat dari struktur data dengan analisis tabulasi silang sederhana, rata-rata pekerja informal wanita yang berstatus sebagai kepala rumah tangga masih mempunyai suami dalam rumah tangga tersebut. Hal ini bisa saja ada kontribusi pendapatan dari suami dalam rumah tangga, sehingga pengeluaran per kapita lebih besar dari kelompok lainnya.

Hal menarik lainnya yang dapat dilihat dari hasil penelitian adalah struktur ukuran rumah tangga. Jumlah anak dalam rumah tangga tidak memengaruhi perbedaan pendapatan per kapita, tetapi jumlah anggota rumah tangga mempunyai perbedaan yang cukup besar. Penulis menduga adanya pengaruh dari tanggungan penduduk lansia dalam rumah tangga, hal ini diikuti dengan penduduk lansia yang cukup besar persentasemnya di Jawa Timur. Namun, hal ini belum bisa dipastikan karena dibutuhkan penelitian selanjutnya untuk membahas isu ini.

Selain itu, variabel lainnya yang menunjukkan perbedaan kesenjangan secara signifikan adalah usia kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan kepemilikan lahan pertanian. Kepala rumah tangga yang berusia lebih tua lebih sejahtera dibandingkan kepala rumah tangga yang berusia muda. Jumlah anggota rumah tangga yang sedikit mempunyai peluang yang lebih besar bagi rumah tangga untuk lebih sejahtera. Rumah tangga yang memiliki lahan pertanian cenderung lebih besar untuk sejahtera dibandingkan yang tidak memiliki lahan pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu bagi pemerintah Jawa Timur untuk mengurangi gap pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Hal ini diperlukan sebagai modal investasi bagi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menyediakan perlindungan dan mengawasi kelayakan upah dalam sektor informal. Upaya lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akses yang lebih mudah bagi para masyarakat, khususnya perempuan, untuk mendapatkan akses pinjaman ke lembaga keuangan agar dapat mendorong masyarakat menjadi pelaku usaha. Beberapa sektor informal seperti usaha kecil yang dikelola oleh perempuan juga dapat diperhatikan demi pembangunan perekonomian Jawa Timur karena hasilnya menunjukkan kontribusi yang positif terhadap pengeluaran per kapita. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terbukanya akses yang ramah perempuan atau ibu bagi pekerja di sektor formal agar kesempatan perempuan untuk bekerja menjadi lebih besar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan data yang bisa saja tidak mewakili keadaan Jawa Timur sebenarnya. Teknik pengambilan data yang acak dalam tingkat nasional dan tidak acak dalam provinsi menyebabkan keterbatasan dari penelitian ini. Hasil ini mungkin dapat mewakili dari sampel yang diteliti. Oleh karena itu, perlu penelitian selanjutnya untuk mengukur beberapa pertanyaan yang timbul dari penelitian ini, seperti pekerja wanita informal dan ketergantungan penduduk lansia dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Ackah, C. (2011). Nonfarm Employment and Incomes in Rural Ghana. *Journal of International Development*. <https://doi.org/10.1002/jid>
- Altamirano Montoya, Á. J., & Teixeira, K. M. D. (2017). Multidimensional Poverty in Nicaragua: Are Female-Headed Households Better Off? *Social Indicators Research*, 132(3), 1037–1063. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1345-y>
- Appleton, S. (1996). Women-headed Households and Household welfare: An Empirical Deconstruction for Uganda. *World Development*, 24(12), 1811–1827. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(96\)00089-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(96)00089-7)
- Arif, G. M., Nazli, H., & Haq, R. (2000). Rural Non-agriculture and Employment and Poverty in Pakistan. *The Pakistan Development Review*, 1089–1110.
- Aronson, R. L. (1991). *Self-Employment: A Labor Market Perspective*. ILR Press.
- Babatunde, R. O., & Qaim, M. (2010). Impact of off-farm Income on Food Security and Nutrition in Nigeria. *Food Policy*, 35(4), 303–311. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2010.01.006>
- Badan Pusat Statistik. (2018a). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi-Desember 2018*.
- Badan Pusat Statistik. (2018b). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2018*.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2018*.
- Bargain, O., & Kwenda, P. (2011). Earnings Structures, Informal Employment and Self-Employment: New Evidence from Brazil, Mexico and South Africa. *Review of Income and Wealth*, 100–122. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2011.00454.x>
- Becker, G. S. (1957). *Human Capital*. University of Chicago Press.
- Beuermann, D. W., McKelvey, C., & Vakis, R. (2010). Mobile Phones and Economic Development in Rural Peru. *Journal of Economic Perspectives*, 24(11), 1617–1628. <https://doi.org/10.1215/00141801-1273111>

g/10.1080/00220388.2012.709615

- Biyase, M., & Zwane, T. (2018). An Empirical Analysis of the Determinants of Poverty and Household Welfare in South Africa. *The Journal of Developing Areas*, 52(1), 115–130. <https://doi.org/10.1353/jda.2018.0008>
- Biyase, Mduduzi, & Zwane, T. (2018). An Empirical Analysis of the Determinants of Poverty and Household Welfare in South Africa. *The Journal of Developing Areas*, 52(1), 115–130. <https://doi.org/10.1353/jda.2018.0008>
- Böhm, B. (1982). Consumption Behavior of Blue and White-collar Households. *Empirica*, 9(1), 3–30. <https://doi.org/10.1007/bf00928157>
- Bolang, P. D., & Osumanu, I. K. (2019). Formal Sector Workers' Participation in Urban Agriculture in Ghana: Perspectives from the Wa Municipality. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02230>
- BPS. (2015a). *Profil Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Timur*.
- BPS. (2015b). *Profil Penduduk Lanjut Usia Jawa Timur 2013*.
- BPS. (2016a). *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur 2014-2015*. <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/230%0A>
- BPS. (2016b). *Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur 2015*.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2015a). *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur 2013-2014*.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2015b). *Profil Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Timur 2014*.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2019). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019*.
- Buvinić, M., & Gupta, R. (1997). Female-headed households and female-maintained families: Are they worth targeting to reduce poverty in developing countries? *Economic Development and Cultural Change*, 45(2), 258–280.
- Canagarajah, S., Newman, C., & Bhattamishra, R. (2001). Non-farm income, gender, and inequality: evidence from rural Ghana and Uganda. *Food Policy*, 26, 405–420.
- Chen, G., & Hamori, S. (2011). Formal and Informal Employment and Income Differentials in Urban China. *Journal of International Development*. <https://doi.org/10.1002/jid>
- Chen, Guifu, & Hamori, S. (2011). Formal and Informal Employment and Income Differentials in Urban China. *Journal of International Development*. <https://doi.org/10.1002/jid>
- Davies, S. (2011). Income, Gender, and Consumption: A Study of Malawian Households. *The Journal of Developing Areas*, 44(2), 1–25.
- Davies, Simon. (2011). Income, Gender, and Consumption: A Study of Malawian Households. *The Journal of Developing Areas*, 44(2), 1–25.
- Drèze, J., & Srinivasan, P. V. (1997). Widowhood and poverty in rural India: Some inferences from household survey data. *Journal of Development Economics*, 54(2), 217–234. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(97\)00041-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(97)00041-2)
- Foster, A. D., & Rosenzweig, M. R. (2004). Agricultural Productivity Growth, Rural Economic Diversity, and Economic Reforms: India, 1970 – 2000. *Economic Development and Cultural*

Change, 52(3), 509–542.

- Gallaway, J. H., & Bernasek, A. (2002). Gender and informal sector employment in Indonesia. *Journal of Economic Issues*, 36(2), 313–321. <https://doi.org/10.1080/00213624.2002.11506473>
- Gautam, H. R., Kumar, R., Bharadwaj, M. L., & Bharat, N. K. (2013). Women surge ahead in agriculture education growth. *Current Science*, 105(9).
- International Labor Organization. (2014). *Indonesia : Pekerjaan Rumahan di Jawa Timur - Temuan dari penelitian kualitatif*.
- Janvry, A. De, & Sadoulet, E. (2001). *Income Strategies Among Rural Households in Mexico: The Role of Off-farm Activities*. *World Development*, 29(3), 467–480.
- Kementerian Keuangan. (2019, April 24). *Ini Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Sebuah Negara*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pentingnya-kesetaraan-gender-untuk-sebuah-negara/>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Ringkasan Eksekutif Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019. In *Laporan Pencapaian SDGs 2019*. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Khan, H. (2014). An Empirical Investigation of Consumption Function under Relative Income Hypothesis: Evidence from Farm Households in Northern Pakistan. *International Journal of Economic Sciences*, 3(2), 43–52.
- Kirchberger, M. (2017). Natural disasters and labor markets. *Journal of Development Economics*, 125, 40–58. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.11.002>
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries. *Feminist Economics*, 15(3), 91–132. <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>
- Klasen, S., Lechtenfeld, T., & Povel, F. (2015). A Feminization of Vulnerability? Female Headship, Poverty, and Vulnerability in Thailand and Vietnam. *World Development*, 71, 36–53. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.11.003>
- Kramer, K. Z., Myhra, L. L., Zuiker, V. S., & Bauer, J. W. (2016). Comparison of Poverty and Income Disparity of Single Mothers and Fathers Across Three Decades: 1990 – 2010. *Gender Issues*, 33, 22–41. <https://doi.org/10.1007/s12147-015-9144-3>
- Lanjouw, P., & Murgai, R. (2009). Poverty Decline, Agricultural Wages, and Non-Farm Employment in Rural India 1983-2004. *Agricultural Economics*, 40, 243–263. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2009.00373.x>
- Lanjouw, P., & Ravallion, M. (1995). Poverty and Household Size. *The Economic Journal*, 105, 1415–1434.
- Majeed, M. T., & Malik, M. N. (2015). Determinants of Household Poverty : Empirical Evidence from Pakistan. *The Pakistan Development Review*, 54(4), 701–718.
- Mat, S. H. C., Jalil, A. Z. A., & Harun, M. (2012). Does Non-Farm Income Improve The Poverty and Income Inequality Among Agricultural Household In Rural Kedah? *Procedia Economics and Finance*, 269–275. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00031-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00031-7)

- Mbratana, T., & Kenne, A. F. (2018). Investigating gender wage gap in employment: A microeconomic type-analysis for Cameroon. *International Journal of Social Economics*, 45(5), 847–865. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0131>
- Mitra, A. (2003). Establishment size, employment, and the gender wage gap. *Journal of Socio-Economics*, 32, 317–330. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(03\)00042-8](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(03)00042-8)
- Nagler, P., & Naudé, W. (2017). Non-farm entrepreneurship in rural sub-Saharan Africa: New empirical evidence. *Food Policy*, 67, 175–191. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.019>
- Narayan, K. (2011). *Urban Women Participation and Livelihoods in the Informal Sector in Fiji: A case study of Suva – Lami Area Statement by Student*. University of the South Pacific.
- Ohene, V. F. (2013). *Determinants of farmers' participation in the youth-in-agriculture programme in the eastern region of Ghana*. University of Ghana.
- Pradhan, M., & van Soest, A. (1995). Formal and informal sector employment in urban areas of Bolivia. *Labour Economics*, 2(3), 275–297. [https://doi.org/10.1016/0927-5371\(95\)80032-s](https://doi.org/10.1016/0927-5371(95)80032-s)
- Quartey, P., Udry, C., Al-Hassan, S., & Seshie, H. (2012). *Agricultural Financing and Credit Constraints in Ghana: The Role of Middlemen in Marketing and Credit Outcomes in Ghana Peter*.
- Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Bustanul, N. (2018). Estimation of Household Consumption Expenditure of Small-Scale Fishermen in Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economics Science*, 375–383. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-11.45>
- Rijkers, B., & Costa, R. (2012). Gender and Rural Non-Farm Entrepreneurship. *World Development*, 40(12), 2411–2426. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.017>
- Ruben, R., & Van Den Berg, M. (2001). Nonfarm employment and poverty alleviation of rural farm households in Honduras. *World Development*, 29(3), 549–560. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00107-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00107-8)
- SOFA Team, & Doss, C. (2011). *The role of women in agriculture*.
- Sohn, K. (2015). Gender Discrimination in Earnings in Indonesia: A Fuller Picture. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1), 95–121. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016569>
- Strauss, J., Witoelar, F., & Sikoki, B. (2014). *The Fifth Wave of the Indonesia Family Life Survey (IFLS): Overview and Field Report*.
- Suryahadi, A., Widyanti, W., Perwira, D., & Sumarto, S. (2003). Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in The Urban Formal Sector. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(1), 29–50. <https://doi.org/10.1080/00074910302007>
- Tansel, A., & Kan, E. O. (2012). The formal/informal employment earnings gap: evidence from turkey. *SSRN Electronic Journal*, 1–45. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2049336>
- Wamuthenya, W. R. (2010). Determinants of Employment in the Formal and Informal Sectors of the Urban Areas of Kenya. *African Economic Research Consortium Research*.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics (6th ed.)*. Cengage Learning.

World Economic Forum. (2018). 2018 The Global Gender Gap Report. *In World Economic Forum*.

Xue, J., Gao, W., & Guo, L. (2014). China Economic Review Informal employment and its effect on the income distribution in urban China. *China Economic Review*, 31, 84–93. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.07.012>

Zereyesus, Y. A., Embaye, W. T., Tsiboe, F., & Amanor-Boadu, V. (2017). Implications of Non-Farm Work to Vulnerability to Food Poverty-Recent Evidence From Northern Ghana. *World Development*, 91, 113–124. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.10.01>

Lampiran

1. Uji Endogenitas

Ho: variables are exogenous

Robust score chi2(1) = 37.2866 (p = 0.0000)

Robust regression F(1,1369) = 38.8787 (p = 0.0000)

2. Uji Kekuatan IV

First-stage regression summary statistics

Variable	R-sq.	Adjusted R-sq.	Partial R-sq.	Robust F(1,1370)	Prob > F
formal	0.2199	0.2125	0.0039	5.91962	0.0151

Minimum eigenvalue statistic = 5.37707

Critical Values	# of endogenous regressors: 1			
Ho: Instruments are weak	# of excluded instruments: 1			
2SLS relative bias	5%	10%	20%	30%
	(not available)			
2SLS Size of nominal 5% Wald test	10%	15%	20%	25%
LIML Size of nominal 5% Wald test	16.38	8.96	6.66	5.53
	16.38	8.96	6.66	5.53